

Prabowo Janji akan Hilangkan Stunting, dan Bantu Orang Miskin

JAKARTA (IM) - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat meminta izin memperpanjang durasi sambutannya dalam acara dialog terbuka yang diselenggarakan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/11).

Di pengujiung sambutannya saat berbicara soal pengentasan stunting. Alarm tanda berakhirnya sambutan sudah berbunyi. Namun, Menteri Pertahanan RI itu masih memberikan sambutan.

"Ya, saya tahu," kata Prabowo merespons bunyi alarm.

"Saya minta izin. Penting ini. Saya enggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit," kata Prabowo yang disambut tepuk tangan hadirin.

Lantas spontan Prabowo pun berjoget sehingga membuat para hadirin tertawa. Ia kemudian melanjutkan sambuannya.

"Kita akan menghilangkan stunting. Kita akan bantu orang miskin, anak-anaknya akan kuat, biar

kuat otak, otot, fisik, tulang. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memohon maaf karena calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak bisa menghadiri dialog terbuka tersebut.

"Hari ini saya minta maaf, saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain," kata Prabowo dalam sambutannya, Jumat (24/11).

Prabowo mengungkapkan, Gibran berhalangan karena menghadiri acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur.

"(Gibran) ada acara lain, bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi menyelenggarakan adalah NU. Jadi, negara ini kalau Muhammadiyah dan NU sudah mantap negara mantap," kata Prabowo. ● han

Ganjar Pranowo Diberi Buku tentang Etika Politik oleh Romo Magnis

JAKARTA (IM) - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menemui Guru Besar Filsafat Moral Romo Franz Magnis Suseno, di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta Timur, Jumat (24/11) pagi.

Ganjar datang sekitar pukul 08.28 WIB. Pertemuan dengan Romo Magnis berlangsung tertutup.

Selang satu jam, Ganjar dan Romo Magnis keluar untuk berjumpa dengan awak media.

Ganjar berkata, pertemuan tadi hanya sebatas diskusi kecil. Bahkan, ia merasa senang telah diberi dua buku karya Romo Magnis. Keduanya ialah Etika Politik: Prinsip Moral dan Dasar Kenegaraan Modern.

"Ini buku legend, hampir semua orang membaca. Etika Politik: Prinsip Moral dan Dasar Kenegaraan Modern dan satu lagi; Iman Dalam Tantangan, Apa Kita Masih Dapat Percaya Pada yang di Seberang?" tutur Ganjar.

Dalam pertemuan itu, Ganjar juga mengaku senang lantaran telah mendapat cerita terkait etik, moral, berbangsa hingga bernegara.

"Saya senang mendapatkan cerita-cerita baik, cerita etik, cerita moral dalam

berbangsa, bernegara, bermasyarakat," kata Ganjar.

Ganjar menegaskan, pertemuan itu hanya sebatas diskusi bukan memberikan dukungan. Meskipun, Ganjar menilai, Romo Magnis seorang warga negara memiliki hak untuk mendukung salah satu kandidat.

"Beliau sebagai intelektual, sebagai tokoh agama tentu beliau punya sikap pribadi. Tetapi tidak boleh berpihak secara terbuka karena itu menunjukkan beliau juga secara institusinya netral begitu ya," tutur Ganjar.

"Sehingga saya sangat hormat, ini seorang orang yang lebih muda datang kepada orang yang lebih tua meskipun rambutnya sama," tandasnya.

Sementara Romo Magnis mengungkapkan pembicaraan dalam perbincangan dengan Ganjar, salah satu yang dibahas adalah masalah persoalan bangsa seperti korupsi hingga kemerosotan etika demokrasi.

"Kami sebetulnya membicarakan bahwa Indonesia itu masih tetap mempunyai masa depan yang cerah, tetapi kita harus mengatasi masalah-masalah yang sekarang dirasakan, masalah seperti korupsi, masalah kemerosotan etika demokrasi," kata Romo Magnis.

Menurutnya, etika demokrasi Indonesia harus kembali pada jalan integritas kejujuran.

Ia menegaskan, politik bukan ajang untuk kontestasi menang-kalah belaka, melainkan untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PELAYARAN MUHIBAH BUDAYA DAN FESTIVAL JALUR REMPAH

Jajaran TNI AL berfoto bersama dengan peserta Muhibah Budaya dan Festival Jalur Rempah saat pemberangkatan pelayaran Muhibah Budaya dan Festival Jalur Rempah di Koarmada II, Surabaya, Jatim, Jumat (24/11). KRI Dewaruci membawa 50 Laskar Rempah dan peneliti ke Kep. Selayar, Sulsel, untuk melaksanakan kegiatan selama 8 hari dengan tujuan memperkenalkan generasi muda tentang sejarah peradaban rempah yang melahirkan keragaman budaya bangsa Indonesia.

MKMK akan Dibentuk Lagi Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Hakim Konstitusi kembali dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik berat terkait dengan putusan MKMK yang mencopotnya dari jabatan ketua MK.

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) segera kembali membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk Anwar Usman, yang dilaporkan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Hakim konstitusi yang merangkap sebagai Juru Bicara MK, Enny Nurbaningih mengatakan, masa kerja MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie akan berakhir pada 24 November 2023.

"Untuk laporan yang baru ke MKMK sesuai dengan ke-

tentuan karena MKMK yang lama sudah berakhir maka dibentuk MKMK yang baru," kata Enny, Jumat (24/11).

Sebelumnya diberitakan, Hakim Konstitusi, Anwar Usman kembali dilaporkan ke dewan etik hakim konstitusi. Paman Gibran Raka Buming Raka Buming itu dilaporkan oleh Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) karena diduga melakukan pelanggaran etik berat terkait dengan putusan MKMK yang mencopotnya dari jabatan ketua MK.

Laporan tersebut pun telah disampaikan ke dewan etik hakim konstitusi di

gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/11). Perekat Nusantara dan TPDI pun meminta MK segera membentuk kembali MKMK.

Koordinator Perekat Nusantara Carrel Ticalu mengatakan, laporan tersebut bermula ketika Anwar Usman mengajukan keberatan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK yang menggantikannya.

Selain itu, pernyataan Anwar Usman terhadap Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, Hamdan Zoelva dan Saldi Isra yang dituding terlibat konflik kepentingan pada saat menangani perkara lampau juga dipermasalahkan. Anwar Usman dianggap telah melanggar etik karena tuduhan tersebut.

"Jelas tuduhan itu adalah sangat ngawur, tidak etis, fitnah, dan sangat tidak bertanggung jawab. Dan mencari pembenaran atas sikapnya

Capres-Cawapres 40 tahun atau punya pengalaman jadi kepala daerah.

Di mana, perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A tersebut ditengarai untuk meloloskan Gibran menjadi Cawapres. Hal itu, menyusul adanya pernyataan Almas dalam perkara itu yang menyebutkan bahwa dia mengidolakan Gibran.

Di satu sisi, Anwar yang merupakan paman Gibran tidak mundur dari perkara tersebut. Dalam peraturan MK, hakim konstitusi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak yang terkait dengan perkara diwajibkan mundur.

Hal inilah yang membuat MKMK memutuskan mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua MK. Kendati begitu, dia masih menjabat sebagai hakim konstitusi. MKMK juga memerintahkan MK untuk melakukan pemilihan ketua MK. Suhartoyo pun terpilih sebagai ketua MK yang baru. ● mei

11 Orang Terjaring OTT KPK di Kaltim, Diduga Terima Suap Pengadaan Barang

JAKARTA (IM) - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang penyelenggara negara dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJN Kaltim) saat menerima uang suap terkait pengadaan barang dan jasa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tangkap tangan ini atas dugaan suap menyuap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (24/11).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufroon menyebut, tujuh

orang di antaranya diduga sebagai pemberi suap dan empat di antaranya penerima suap. Dalam OTT tersebut KPK juga mengamankan uang senilai ratusan juta rupiah.

"Tidak menutup kemungkinan ini sudah pemberian ke berapa jadi kita masih mengembangkan," kata Ghufroon.

Ali menjelaskan bahwa BBPJN Kaltim berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).

BBPJN Kaltim memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian jalan nasional di Kaltim.

Ali mengungkap bahwa

OTT ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima KPK pada Mei 2023.

Saat ini, 11 orang yang ditangkap sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. "Sedang dilakukan pemeriksaan tim di Gedung Merah Putih KPK," tutur Ali.

Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih, Jumat (24/11), ada enam mobil yang membawa total 11 orang hasil OTT di Kaltim tersebut. Namun, enam mobil yang memasuki area gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.47 WIB itu langsung menuju pintu belakang.

Saat dikonfirmasi, Dalam OTT kali ini, penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang senilai ratusan juta rupiah. ● han

MK Bacakan Putusan "Gugatan Ulang" Usia Capres-Cawapres pada 29 November 2023

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pembacaan putusan atas gugatan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diajukan Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana pada Rabu (29/11).

Gugatan ini dilayangkan setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan eks Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat atas perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Rabu 29 November 2023 pengucapan putusan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023," demikian agenda sidang yang dimuat di situs MK, Jumat (24/11).

Gugatan yang register nomor 141/PUU-XXI/2023 ini meminta usia di bawah 40 tahun yang boleh maju sebagai capres-cawapres adalah yang pernah/sedang menjadi gubernur saja. Sebab, dalam penyusunan putusan sebelumnya, lima hakim konstitusi yang setuju mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pun tak bulat pandangan. Dari lima hakim itu, hanya tiga hakim (Anwar Usman, Manahan Sitompol, Guntur Hamzah) yang sepakat bahwa anggota legislatif atau kepala daerah tingkat apa pun, termasuk gubernur, berhak maju sebagai capres-cawapres. Namun, dua hakim lainnya (Enny Nurbaningih dan Daniel Yusmic Pancastaki Foeckh) sepakat hanya kepala daerah setingkat gubernur yang berhak.

Menurut pemohon gugatan, hal ini dapat menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan putusan atas pemaknaan. Pasalnya, jika dibaca secara utuh, maka hanya jabatan gubernur lah yang bulat disepakati lima hakim konstitusi untuk bisa maju sebagai capres-cawapres. "Yang setuju pada tingkat di bawah gubernur hanya tiga hakim konstitusi, sementara yang setuju pada tingkat gubernur lima hakim konstitusi," kata Brahma.

Ia menegaskan bahwa frasa baru pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu seharusnya inkonstitusional karena hanya berdasarkan tiga suara hakim dari lima suara hakim yang dibutuhkan. Kuasa Hukum Brahma, Viktor Santoso Tandiasa menyampaikan bahwa pemohon hanya menginginkan adanya penguatan terhadap legitimasi pemilihan umum (Pemilu) yang lemah lantaran putusan 90 tersebut.

Viktor berharap apa pun putusan MK, dapat memberikan pertimbangan hukum dalam perkara 141 yang bisa mengembalikan legitimasi pemilu usai dinilai cacat karena putusan nomor 90 yang terjadi pelanggaran etik dalam prosesnya.

"Harapan kita bersama pemilu dapat terselenggara selain jujur dan adil juga memiliki legitimasi yang kuat, sehingga jangan sampai MK menempatkan diri pada pihak yang membuat cacatnya legitimasi termasuk terjadinya persoalan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), apalagi penyelesaian akhir sengketa pemilu (pilpres) ada di MK," kata Viktor. ● han

PENGUMUMAN TENTANG HASIL PENGAMBILALIHAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan ini diumumkan bahwa rencana pengambilalihan PT IOT EPC Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya telah terlaksana.

Jakarta, 25 November 2023

Direksi
PT IOT EPC INDONESIA

PT SUKSES PRIMATAMA BERSAMA ("Perseroan")

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUP") dengan ini Direksi PT. SAMUDRA SEMESTA RAYA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") memberitahukan bahwa Para Pemegang Saham Perseroan akan mengalihkan seluruh saham dalam Perseroan kepada Pihak Ketiga langsung dari Para Pemegang Saham sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan tersebut. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atas pengalihan saham tersebut dapat mengajukan keberatan melalui surat tercatat atau menghubungi kantor Perseroan di:

Jl. TB Simatupang Kav.35, Cilandak Jakarta Selatan

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini dibuat.

Demikianlah Pembentukan ini untuk dapat diketahui.

Jakarta, 25 November 2023

Direksi Perseroan

PT SOLARONE PRATAMA INTERNASIONAL Berkedudukan di Jakarta Utara

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN

Pemegang saham dalam PT SOLARONE PRATAMA INTERNASIONAL ("Perseroan") bermaksud mengalihkan sebagian besar saham dalam Perseroan kepada pemegang saham baru.

Pengalihan saham di atas adalah pengambilalihan saham-saham yang dilakukan secara langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 125 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUP").

Para Kreditor dapat mengajukan keberatan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini, sehubungan dengan pengalihan saham disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung ke alamat:

PT SOLARONE PRATAMA INTERNASIONAL
Altira Business Park Lt 38
Jl Yos Sudarso Kavelling 85, Sunter Jaya, Jakarta Utara

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan ayat (8) UUP.

Jakarta, 25 November 2023

Direksi Perseroan



IALOG PUBLIK BERSAMA PRABOWO SUBIANTO

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjawab pertanyaan panelis saat menghadiri Dialog Publik di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jatim, Jumat (24/11). Dialog tersebut bertujuan untuk menguji pengetahuan, wawasan serta gagasan capres dan cawapres sehingga pada Pemilu 2024 masyarakat menjadi warga yang cerdas dalam memilih pemimpin.